

PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DESDM PROVINSI BANTEN TAHUN 2023



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al Bantani - Palima Telp. (0254) 267109 Fax. 267110

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala dengan limpahan rahmat serta hidayah-Nya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten telah menyusun Laporan Perjanjian Kinerja (PERKIN) Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten telah menyusun Perjanjian Kinerja (PERKIN) Tahun 2023 baik itu di level Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV.

Perjanjian Kinerja ini diharapkan tidak terbatas hanya dokumen tertulis saja namun diharapkan dapat meningkatkan komitmen serta semangat bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten untuk mewujudkan target-target yang sudah ditetapkan untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Banten.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga kinerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik dan akuntabel serta memberikan manfaat bagi peningkatan pembangunan dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Serang, Januari 2023

**Plt. KEPALA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN**



DERI DARIAWAN, S.T, M.MT
NIP. 19780311-200112 1 002

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Eselon II (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023.
2. Perjanjian Kinerja Eselon III di Lingkungan Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 20223.
3. Perjanjian Kinerja Eselon IV di Lingkungan Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023.
5. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023.
6. Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023.

LAMPIRAN I

Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Tahun 2023.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DERI DARIAWAN, ST, M.MT**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

AL MUKTABAR

DERI DARIAWAN, ST, M.MT
NIP. 19780311 200112 1 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Pelayanan Kelistrikan dan Energi terbarukan yang Optimal	Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru terbarukan	Persen	5
		Rasio Elektrifikasi	Persen	98,2
4	Meningkatnya Pengembangan dan Pengendalian Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral	Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral	Persen	55,25

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	44.158.000.000
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.332.519.000
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	2.340.000.000
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	579.237.000
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	606.695.000
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	17.299.549.000
	TOTAL BELANJA	44.158.000.000

Pj. GUBERNUR BANTEN,



AL MUKTABAR

Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



DERI DARIAWAN, ST, M.MT
NIP. 19780311 200112 1 002

LAMPIRAN II

Perjanjian Kinerja Eselon III Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Tahun 2023.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DERI DARIAWAN, ST, MM.T**

Jabatan : **KABID. GEOLOGI DAN AIR TANAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DERI DARIAWAN, ST, MM.T**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,

DERI DARIAWAN, ST, MM.T
NIP. 19780311 200112 1 002

Pihak Pertama,

DERI DARIAWAN, ST, MM.T
NIP. 19780311 200112 1 002

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah	Persen	56,52

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
3	UNSUR PEMERINTAHAN PILIHAN	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1.230.000.000
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1.230.000.000
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah	1.110.000.000
3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	185.000.000
3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	400.000.000
3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	525.000.000

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



DERI DARIAWAN, ST, MM.T
NIP. 19780311 200112 1 002



DERI DARIAWAN, ST, MM.T
NIP. 19780311 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. NIRMAN, MH**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DERI DARIAWAN, ST, MM.T**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,

DERI DARIAWAN, ST, MM.T
NIP. 19780311 200112 1 002

Pihak Pertama,

Drs. NIRMAN, MH
NIP. 19660324 198709 1 001

SATUAN KERJA : **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DPA TA-2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
3	UNSUR PEMERINTAHAN PILIHAN	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
3.29.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000
3.29.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000
3.29.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15.000.000
3.29.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	15.000.000
3.29.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000
3.29.01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000
5.01.02.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000
5.01.02.1.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.000.000
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.277.010.000
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.576.250.000
3.29.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	600.760.000
3.29.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.133.800
3.29.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	23.520.000
3.29.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.600.000

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
3.29.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.250.000
3.29.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	32.146.200
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	61.500.000
3.29.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000
3.29.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000
3.29.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000
3.29.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Pendanaan	20.000.000
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	118.900.000
3.29.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.800.000
3.29.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.210.000
3.29.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14.310.000
3.29.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.730.000
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37.850.000
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	614.742.000
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.492.000
3.29.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.000.000
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000
3.29.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
3.29.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	134.250.000
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000
3.29.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	50.000.000
3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.932.959.000
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305.328.000
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.625.231.000
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	627.408.000
3.29.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.460.000
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.920.000
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.230.000
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.798.000

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,



DERI DARIAWAN, ST, MM.T
NIP. 19780311 200112 1 002

Pihak Pertama,



Drs. NIRMAN, MH
NIP. 19660324 198709 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARI JAMES FARADDY, ST. M.Si. MT**

Jabatan : **KABID PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DERI DARIAWAN, ST, MM.T**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,

DERI DARIAWAN, ST, MM.T
NIP. 19780311 200112 1 002

Pihak Pertama,

ARI JAMES FARADDY, ST. M.Si. MT
NIP. 19771230 200212 1 008

SATUAN KERJA : **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL**

DPA TA-2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	17,86
2	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS)	Rumah Tangga Sasaran (RTS)	17.000

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
3	UNSUR PEMERINTAHAN PILIHAN	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	
3.29.05.1.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan KepulauanTenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	606.695.000
3.29.05.1.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	576.695.000
3.29.05.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	30.000.000
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	16.544.549.000

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
3.29.06.1.06.03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	649.499.500
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	15.895.049.500

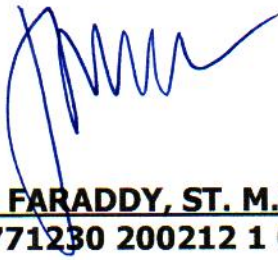
Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,



DERI DARIAWAN, ST, MM.T
NIP. 19780311 200112 1 002

Pihak Pertama,



ARI JAMES FARADDY, ST. M.Si. MT
NIP. 19771230 200212 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SUCIPTO, MT**

Jabatan : **KABID. PEMANFAATAN KETENAGALISTRIKAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DERI DARIAWAN, ST, MM.T**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,

DERI DARIAWAN, ST, MM.T
NIP. 19780311 200112 1 002

Pihak Pertama,

Drs. SUCIPTO, MT
NIP. 19660913 199403 1 003

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar	Persen	77,17

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
3	UNSUR PEMERINTAHAN PILIHAN	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan	755.000.000
3.29.06.1.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	150.000.000
3.29.06.1.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah ProvinsiProvinsiAir Tanah dalam Daerah Provinsi	180.000.000
.29.06.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	425.000.000

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


DERI DARIAWAN, ST, MM.T
NIP. 19780311 200112 1 002


Drs. SUCIPTO, MT
NIP. 19660913 199403 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI KURNIAWAN, ST. MT.**

Jabatan : **Plt. KABID. MINERAL DAN BATUBARA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DERI DARIAWAN, ST, MM.T**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,

DERI DARIAWAN, ST, MM.T
NIP. 19780311 200112 1 002

Pihak Pertama,

BUDI KURNIAWAN, ST. MT.
NIP. 19810112 200604 1 007

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara	Persen	45,40

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
3	UNSUR PEMERINTAHAN PILIHAN	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	166.000.000
3.29.03.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100.000.000
3.29.03.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	36.000.000
3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	30.000.000
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	159.000.000
3.29.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	129.136.000

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	5.864.000
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	24.000.000
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	254.237.000
3.29.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	145.350.000
3.29.03.1.04.03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	5.526.000
3.29.03.1.04.05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	103.361.000

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,



DERI DARIWAN, ST, MM.T
NIP. 19780311 200112 1 002

Pihak Pertama,



BUDI KURNIAWAN, ST. MT.
NIP. 19810112 200604 1 007

LAMPIRAN III

Perjanjian Kinerja Eselon IV di Lingkungan Dinas Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AAN MULYANA, SE. MM**

Jabatan : **KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. NIRMAN, MH**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,

Drs. NIRMAL, MH
NIP. 19660324 198709 1 001

Pihak Pertama,

AAN MULYANA, SE. MM
NIP. 19710711 200212 1 004

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1
6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan	Laporan	1

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1
17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1
18	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	122
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
3	UNSUR PEMERINTAHAN PILIHAN	3.555.509.000
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.555.509.000
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.555.509.000
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	61.500.000
3.29.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000
3.29.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000
3.29.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000
3.29.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	118.900.000
3.29.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.800.000
3.29.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.210.000
3.29.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14.310.000
3.29.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.730.000
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37.850.000
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	614.742.000
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.492.000
3.29.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.000.000
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000
3.29.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000
3.29.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	134.250.000
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000
3.29.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	50.000.000
3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.932.959.000
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305.328.000
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.625.231.000
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	627.408.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
3.29.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.460.000
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.920.000
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.230.000
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.798.000

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,



Drs. NIRMAN, MH
NIP. 19660324 198709 1 001

Pihak Pertama,



AAN MULYANA, SE. MM
NIP. 19710711 200212 1 004

LAMPIRAN IV

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Banten Tahun 2023.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023**

- Perangkat Daerah : **'DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN**
- Tugas Pokok : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi
- Fungsi : a. Pengelolaan Aspek Kegeologian;
b. Pengelolaan Mineral dan Batubara;
c. Pengelolaan Energi Terbarukan;
d. Pengelolaan Ketenagalistrikan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	5,00
		Rasio Elektrifikasi	Persen	98,20
2	Meningkatnya pengembangan dan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral	Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral	Persen	55,25
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80

Serang, Januari 2023

**Pt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN**

DERI DARIAWAN, S.T. M.MT
NIP. 19780311 200112 1 002

LAMPIRAN V

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja di Lingkungan Dinas Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023.

RENCANA AKSI (RENAKSI)

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2023

SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD/RENSTRA	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				TARGET REALISASI PERTRIWULAN				PENANGUNGJAWAB
			Uraian	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD/RENSTRA	KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target RENSTRA	URAIAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Output	ANGGARAN	TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Satuan : Nilai)	Nilai : 70-80	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100 %							23.332.519.000					Kepala Dinas ESDM
												23.332.519.000					Sekretaris
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100%				500.000.000					
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 dokumen	100.000.000	1	0	1	0	
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2 dokumen	15.000.000	0	0	0	1	
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3 dokumen	15.000.000	0	0	1	0	
									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4 dokumen	5.000.000	0	0	0	1	
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5 dokumen	5.000.000	0	0	0	1	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12 Dokumen	100.000.000	3	3	3	3	
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3 Dokumen	260.000.000	1	0	1	1	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100%				19.277.010.000					
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Meorima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	984 Orang/ Bulan	18.576.250.000	3	4	4	3	
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	600.760.000	3	3	3	3	
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	25.133.800	3	3	3	3	
									Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	23.520.000	3	3	3	3	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	6.600.000	0	0	0	1	
									Pengelolaan dan Penyipian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1 Dokumen	8.250.000	0	0	0	1	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18 Laporan	32.146.200	4	5	5	4	
									Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan)	1 Dokumen	4.350.000	0	0	1	0	

SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD/RENSTRA	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				TARGET REALISASI PERTRIWULAN				PENANGUNGJAWAB			
			Uraian	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD/RENSTRA	KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target RENSTRA	URAIAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Output	ANGGARAN	TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4				
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100%				61.500.000								
									Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2 dokumen	20.000.000	0	1	0	1				
									Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	20.000.000	0	0	0	1				
									Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1 Dokumen	1.500.000	0	0,25	0,25	0,50				
									Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1 Dokumen	20.000.000	0,10	0,30	0,30	0,20				
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan administrasi umum perkantoran perangkat daerah	100%				614.742.000								
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	15.000.000	0,25	0,25	0,25	0,25				
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	176.492.000	0,25	0,25	0,25	0,25				
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 Paket	30.000.000	0,25	0,25	0,25	0,25				
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	24.000.000	0,25	0,25	0,25	0,25				
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1 Laporan	10.000.000	0,00	0,50	0,00	0,50				
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	200.000.000	0,25	0,25	0,25	0,25				
									Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	25.000.000	0,25	0,25	0,25	0,25				
									Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	134.250.000	0,25	0,25	0,25	0,25				
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%				200.000.000								
									Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1 Paket	50.000.000	1	0	0	0				
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12 Unit	150.000.000	0	12	0	0				
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%				1.932.959.000								
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12 Laporan	2.400.000	0	6	0	6				
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	305.328.000	3	3	3	3				
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	1.625.231.000	3	3	3	3				
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%				627.408.000								
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6 Unit	200.460.000	6	1,7	1,1	3				
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20 Unit	190.920.000	3,70	4,48	4,26	7,49				
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	118 Unit	111.230.000	30,50	28,50	30,50	29				
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	124.798.000	0	1	0	0,00				

SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD/RENSTRA	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				TARGET REALISASI PERTRIWULAN				PENANGUNGJAWAB
			Uraian	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD/RENSTRA	KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target RENSTRA	URAIAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Output	ANGGARAN	TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100%	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	2 Paket	118.900.000	0	2	0	0	Aan Mulyana,SE, MM
									Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1 Dokumen	3.210.000	0	0	0	1	
									Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1 Dokumen	14.310.000	0	0	0	1	
									Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12 Dokumen	2.730.000	3	3	3	3	
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10 Orang	37.850.000	2	2	2	4	
												2.919.237.000					Kepala Dinas ESDM
Meningkatnya pengembangan dan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral	Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral (Satuan : %)	55,25 %	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah (%)	56,52							2.340.000.000					Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah
						Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (%)	100%	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	6 Dokumen	1.230.000.000	0	0	0	6	
						Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (%)	100%	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (Dokumen)	21 Dokumen	185.000.000	6	5	6	4	
									Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	1 Dokumen	400.000.000	0	0	0	1	
									Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	4 Dokumen	525.000.000	0	0	0	4	
												579.237.000					Pit. Kepala Bidang Mineral dan Batubara
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (%)	45,40							166.000.000					
						Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (%)	100%	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah (Dokumen)	1 Dokumen	100.000.000	0	0	1	0	
									Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan	6 Dokumen	36.000.000	0	0	0	6	
									Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Laporan)	1 Dokumen	30.000.000	0	0	0	1	

SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD/RENSTRA	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				TARGET REALISASI PERTRIWULAN				PENANGUNGJAWAB			
			Uraian	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD/RENSTRA	KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target RENSTRA	URAIAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Output	ANGGARAN	TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4				
						Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (%)	100%				159.000.000								
									Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat (Laporan)	7 Dokumen	129.136.000	0	1	4	2				
									Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Dokumen)	5 Dokumen	5.864.000	1	1	2	0				
									Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Laporan)	1 Dokumen	24.000.000	0	0	0	1				
						Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (%)	100%				254.237.000								
									Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat (Laporan)	2 Dokumen	145.350.000	0	2	0	0				
									Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Dokumen)	2 Dokumen	5.526.000	0	1	0	1				
									Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) (Laporan)	4 Dokumen	103.361.000	0	1	2	1				
Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (%)	5,00 %	PENGLOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (%)	17,86%							606.695.000					Kepala Dinas ESDM			
									606.695.000						Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan					
						Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan (%)	100%				606.695.000								
						Penetapan Prosedur dan Peryaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen Prosedur dan Perysaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan yang Ditetapkan (Dokumen)	5 Dokumen	576.695.000	0	0	3	1							
								Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan (Laporan)	1 Dokumen	30.000.000	0	0	0	1					

BASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR BASARAN	TARGET RPJMD/RENSTRA	PROGRAM			KEGIATAN			RUB KEGIATAN				TARGET REALISASI PERTIWIWILAN				PENANGGUNGJAWAB
			Urutan	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD/RENSTRA	KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target RENSTRA	URAIAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Output	ANGGARAN	TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4	
												17.399.549.000					Kepala Dinas ESDM
	Rasio Elektrifikasi (%)	98,20 %	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkelambang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS)	17000							16.544.549.000					Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
								100%				16.544.549.000					
						Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkelambang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Perencanaan Ketercapaian Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkelambang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (%)		Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Laporan)	6 Dokumen	649.499.500	0	1	1	4	
									Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkelambang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkelambang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	8500 RTS	15.895.049.500	0	250	6000	2250	
												755.000.000					Kabid Pemasangan Ketenagalistrikan
								100%				755.000.000					
						Pemenuhan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penguasaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Perencanaan Ketercapaian Kegiatan Pemenuhan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penguasaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (%)		Penerapan Prosedur dan Penyediaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penguasaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Penyediaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penguasaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditampilkan (Dokumen)	7 Dokumen	150.000.000	0	0	4	3	
									Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penguasaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penguasaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	70 surat	180.000.000	25	15	15	15	
									Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penguasaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penguasaan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Laporan)	3 Dokumen	425.000.000	0	0	0	3	
												TOTAL	26.858.451.000				

Serang, Januari 2023
 Pjt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Provinsi Banten

DERI DARIAWAN, S.T. M.MT
 NIP. 19780311 200112 1 002

LAMPIRAN V

Dokumentasi Penandatanganan Bersama Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja di Lingkungan Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023.

DOKUMENTASI
PENANDATANGANAN BERSAMA DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (PERKIN)
DAN PENYERAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2023









